

BAB II

MENELISIK KONDISI KAWASAN PERBATASAN RI-PNG

Perbatasan Indonesia - Papua New Guinea, yang selanjutnya akan disebut RI-PNG, berada dalam situasi administratif yang dinamis. Hal tersebut mempengaruhi fakta sosial dan kebudayaan dalam bingkai tata kelola perbatasan sebuah negara modern. Kedatangan Belanda dan Inggris yang membagi pulau Papua lewat Deklarasi Raja Prusia pada 22 Mei 1885, yang kemudian menjadi acuan bagi penentuan batas wilayah antara Indonesia dan Papua New Guinea, telah memunculkan sejumlah konflik. Ini terutama karena penetapan garis batas tidak mempertimbangkan kondisi topografis dan sosiologis masyarakat setempat. Di bagian utara daerah perbatasan, misalnya, garis demarkasi berada pada kondisi medan yang sangat sulit dijangkau. Berbeda dengan perbatasan bagian selatan yang kondisi topografinya cukup landai, datar dan berawa. Selain itu, penarikan garis demarkasi juga telah membelah satu komunitas sosial yang memiliki adat kuat, hingga teritorial kedua negara kini menjadi tumpang tindih dengan keberadaan tanah ulayat masyarakat setempat. Untuk dapat mengidentifikasi masalah tersebut, berikut digambarkan profile perbatasan RI-PNG dari masa ke masa.

A. Profile Perbatasan RI-PNG

Persoalan-persoalan yang terjadi di kawasan RI-PNG tidak terjadi begitu saja, melainkan ada latar belakang panjang yang menyebabkannya. Karena itu, persoalan-persoalan di kawasan perbatasan RI-PNG perlu dibicarakan dengan pertama-tama memahami situasi dan kondisi perbatasan pada aspeknya yang paling mendasar. Berikut adalah gambaran profile perbatasan RI-PNG dari masa ke masa.



Gambar 1. Misionari Eropa di Paniai, Papua (1855-1963). Sumber: West Papuan Human Right Defenders News

1. Datangnya Bangsa Eropa Ke Tanah Papua

Ketika bangsa Eropa kali pertama datang ke tanah Papua dalam perburuan rempahnya di abad ke-16, penduduk Papua

dan pulau-pulau kecil di sekitarnya masih mengandalkan tulang, kayu, dan alat-alat dari batu. Mereka memiliki sistem pertanian yang produktif. Mereka juga berdagang di sepanjang pantai, terutama untuk tembikar, ornamen kerang dan bahan-bahan makanan. Sementara jauh di pedalaman, hasil hutan dan hasil laut saling dipertukarkan. Saat itu baru ada bangsa Spanyol dan Portugis. Bangsa Inggris, Perancis dan Belanda masih membutuhkan waktu hampir seabad kemudian untuk bisa menjelajahi samudera Hindia dan tiba di tanah Papua.¹

Pada akhir abad 17, Eropa diwarnai persaingan sengit antara Inggris dan Perancis—persaingan yang terus memanjang bahkan hingga daerah koloni mereka di Amerika Utara, India dan Pasifik. Dampier adalah kapten Inggris pertama yang berlayar di perairan Papua. Pelayarannya mengarah ke timur sepanjang pantai utara Papua, melewati bagian antara New Britain dan Umboi Pulau yang sekarang dikenal sebagai Selat Dampier. Untuk periode yang singkat, Inggris berusaha membentuk sebuah pemukiman. Namun wabah penyakit dan prospek ekonomi yang buruk membuat pemukiman mereka hanya berusia dua tahun saja.

Perancis pun membuat sejumlah pelayaran di perairan New Guinea. Comte de Bougainville berlayar dari New Hebrides ke Louisiade dan kemudian bagian pantai utara di

¹ P. Biskup, B. Jinks and H. Nelson, *A Short History of New Guinea*, Angus and Robertson Ltd, Sydney, 1963.

tahun 1768, D'Entrecasteaux berlayar melalui perairan Melanesia pada akhir abad kedelapan belas. Pada pertengahan abad kesembilan belas, Kapal Fly dan Bramble milik Inggris kembali menjelajahi garis pantai selatan Papua. Lalu ekspedisi dilanjutkan oleh Kapten Owen Stanley pada tahun 1849, dan Kapten John Moresby pada tahun 1873. Dan Inggris berhasil memenangkan kompetisi atas Perancis dan menguasai wilayah timur Papua.

Pada tahun 1883, Jerman menguasai kuartal timur laut tanah Papua dan membentuk German New Guinea—sebuah perusahaan dagang yang mempekerjakan ribuan tenaga lokal sebagai tenaga kerja murah di perkebunan kakao dan kopra.² Perusahaan dagang tersebut mendapat mandat penuh dari pemerintah Jerman atas wilayahnya di Papua. Namun lima tahun setelahnya, kekaisaran Jerman mengambil alih wilayah timur laut Papua dan mulai mengontrolnya secara langsung. Sejak saat itulah, timur laut Papua dikenal dengan nama German New Guinea. Melihat itu, Inggris merasa perlu khawatir dengan aktifitas Jerman di utara. Mereka pun berniat memperluas wilayah protektoratnya. Keberatan Jerman atas apa yang dilakukan Inggris kemudian membawa mereka pada perjanjian wilayah yang berlangsung di tahun 1885.³ Papua bagian timur pun terbagi dalam kekuasaan Inggris dan Jerman.

Sementara di belahan barat pulau Papua pada tahun 1601, pelaut asal Belanda bernama William Jansen mendarat di Pulau Kai, Pulau Aru, Pantai Barat Daya Papua. Sepuluh tahun kemudian menyusul pelaut Belanda lainnya, William Schouten dan Le Maire, yang melakukan pelayaran sampai ke Teluk Cenderawasih. Pada tahun 1622, Jan Cartstenz melakukan pelayaran di sebelah selatan Papua guna mencari perluasan daerah jajahan VOC. Namun pada 9 November 1774, Belanda jatuh ke tangan Inggris. Jalur rempah-rempah Belanda di Papua pun diambil alih.

² Pim Schoorl dalam *Belanda di Irian Jaya: Amtenar di Masa Penuh Gejolak 1945-1962*, diterjemahkan oleh R.G. Soekadijo, Garba Budaya, Jakarta, 2001.

³ P. Bishop, B. Jinks and H. Nelson, *op.cit.*

Selama hampir dua puluh tahun Inggris menjalin hubungan baik dengan Kesultanan Tidore. Hingga pada tahun 1793, Inggris benar-benar menguasai Papua barat dan menjadikannya koloni. Mereka mendirikan benteng Coronation di Teluk Doreri, Manokwari. Dinamika hubungan Belanda dengan kerajaan-kerajaan di timur nusantara seperti Tidore dan Jailolo mengalami pasang-surut. Situasi politik Eropa pada saat itu pun begitu tentatif. Belanda sendiri sebagai penguasa nusantara raya sesekali dikuasai Perancis atau Inggris. Hingga pada tahun 1814, berdasarkan konvensi antara Belanda dan Britania Raya, Papua Barat kembali dikuasai Belanda. Empat belas tahun kemudian Belanda mendirikan pos militer di Tritonbaai dan sebuah tugu yang diberi nama tugu Fort De Bus di teluk Triton, kaki Gunung Lumenciri. Lewat sebuah proklamasi, seluruh daerah di Papua barat garis 141° Bujur Timur pun dijadikan bagian dari Hindia-Belanda:

...atas nama dan untuk Sri Baginda Raja Nederland, bagian daerah New Guinea dengan daerah pedalamannya dimulai pada garis meridian 141° Timur Greenwich di pantai Selatan terus ke arah Barat, Barat Daya dan Utara sampai ke Semenanjung Goebe Hoop di pantai Utara, kecuali daerah Mansari, Karondefer, Ambarpura dan Amberoon yang dimiliki oleh Sultan Tidore, dinyatakan milik Belanda. Dengan ketegasan ini, maka orang-orang Eropa lainnya tidak boleh menempati dan menguasai daerah tersebut.⁴

Pada tahun 1836, setelah selama delapan tahun 10 perwira, 50 prajurit Eropa, dan 50 prajurit Indonesia gugur karena konflik dengan penduduk pribumi, benteng yang dibangun Dus Bus dibongkar dan ditinggalkan. Tapi kemudian kita tahu bahwa di tahun-tahun berikutnya Belanda kembali menduduki Papua. Selain faktor ekonomi dan pekabaran Injil, yang membuat Belanda kembali menaruh perhatian pada

⁴ Mustopo, Api Perjuangan Pembebasan Irian Barat, Yayasan Badan Kontak Keluarga Besar Perintis Irian Barat, Jakarta, 1986.

Papua adalah fakta bahwa saat itu suku Tugeri kerap melakukan penyerangan ke wilayah Nieuw Guinea Inggris hingga pemerintah kolonial Inggris mengancam akan memasuki wilayah koloni Belanda jika Belanda tidak mampu menertibkannya.⁵ Sebuah deklarasi berisi kesepakatan antara Inggris, Jerman dan Belanda atas penguasaan tanah Papua pun digelar (Deklarasi Raja Prusia, 22 Mei 1885).

Konflik antara Belanda dan Inggris kembali terjadi. Hingga pada 16 Mei 1895, Pemerintah Belanda dan Inggris sepakat: Belanda menguasai Papua sebelah barat dan Inggris menguasai Papua sebelah timur berbagi dengan Jerman. Tiga tahun setelah kesepakatan tersebut, pemerintah Hindia Belanda mulai mendirikan pos-pos pemerintahan di Fak-Fak di bagian pantai barat dan di Manokwari di bagian pantai barat-laut. Pada tahun 1902, di pantai tenggara dibangun sebagai pos ketiga, terutama karena gangguan yang dialami oleh pemerintah Inggris oleh serbuan pengayau dan penjarah suku Marind-Anim dari pantai tenggara Nugini-Belanda. Lalu pemerintah Hindia membeli hak Tidore atas *Afdeling Zuid*⁶ Nieuw-Guinea (Nugini-Belanda bagian Selatan) seharga f 6000, hingga wilayah tersebut mutlak dikuasai Belanda.

Dengan demikian, tanah Papua terbagi dalam tiga wilayah yang masing-masing dikuasai Inggris, Jerman, dan Belanda. Kelak pembagian wilayah antara pemerintah Indonesia dan New Guinea Timur yang saat itu diwakili Australia pertamamata mengacu pada Deklarasi Raja Prusia 22 Mei 1885 tersebut.

⁵ Rosmaida Sinaga dalam disertasinya yang berjudul *Masa Kuasa Belanda di Papua, 1898-1962*.

⁶ *Afdeling* adalah wilayah yang dikuasai dan diatur oleh Asisten residen.



Gambar 2. Peta Wilayah Inggris, Jerman dan Belanda di Papua.

2. Masa Kemerdekaan Hindia Belanda di Papua

Kecuali Onderafdeling Merauke dan Boven-Digul, tahun 1942 Nugini-Belanda ditaklukkan militer Jepang setelah serangannya ke Pearl Harbour. Namun dua tahun berikutnya, Sekutu berhasil mendarat di Tanah Merah dan Humboldtbaai di pantai utara pada April 1944. Seluruh Nugini-Belanda pun dikembalikan pada Belanda. Sejak saat itu, Papua Barat dijadikan satu wilayah administratif: Papua Barat dari 1944 hingga 1949 menjadi keresidenan dan kemudian, sampai penyerahan kedaulatan pada 1962, menjadi sebuah gubernuran. Daerahnya dibagi-bagi menjadi beberapa *afdeling*, *onderafdeling*, dan distrik.⁷

Pada 17 Agustus 1945, Hindia Belanda memproklamasikan kemerdekaannya menjadi negara Indonesia. Sidang Badan Panitia Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) menetapkan wilayah Indonesia yang terdiri dari 18 Provinsi mulai dari Sumatra hingga Maluku. BPUPKI yang dibentuk Jepang dengan nama *Djokuritsu Jumbi Kosakai* itu selanjutnya diubah menjadi PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Dalam forum PPKI tanggal 15 Agustus 1945 itulah Soekarno mengatakan bahwa “Yang disebut Indonesia adalah pulau-pulau Sunda Besar (Jawa, Sumatra, Borneo, dan

⁷ Pim Schrool, *op.cit.*

Celebes) dan Pulau-pulau Sunda Kecil (Bali, Lombok, NTB dan NTT, Maluku). Tetapi untuk keamanan Indonesia dari arah Pasifik, maka kita perlu menguasai Papua”.⁸

Indonesia pun menuntut semua wilayah bekas Hindia Belanda sebagai wilayahnya. Akan tetapi, dengan alasan bahwa ras melanesia berbeda dengan ras penghuni nusantara, Belanda ingin menjadikan Papua Bagian Barat sebagai negara yang terpisah dari NKRI. Sengketa pun dimulai. Namun bahkan Konferensi Meja Bundar di Den Haag tak menyelesaikan persoalan. Pembahasan sengketa Papua akhirnya ditunda untuk beberapa lama. Dalam rentang itu, pemerintah Indonesia sendiri secara sepihak mengangkat Zainal Abidin Syah, Sultan Tidore, sebagai gubernur pertama Papua yang saat itu beribukota di Soasiu, pulau Tidore (1956-1961). Sengketa atas Papua menjadi semakin keruh dan berlarut-larut. Sampai saat terjadilah kontak senjata antara Indonesia dan Belanda pada Desember 1961 dan awal 1962.

Sebelumnya, pada 1 Desember 1961, Belanda yang masih memiliki pengaruh kuat di Papua memerintahkan agar bendera Bintang Kejora Papua Barat dikibarkan berdampingan dengan bendera Belanda. Delapan belas hari setelah peristiwa tersebut, di Yogyakarta, Presiden Soekarno membalasnya dengan mengumandangkan Tri Komando Rakyat (Trikorra) dengan perintah: gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda, kibarkan bendera merah putih di Irian Barat, dan kerahkan semua kekuatan, termasuk para sukarelawan, untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa dengan merebut Irian Barat. Penyikapan ini direalisasikan pada 11 Januari 1962 dengan membentuk Komando Mandela Pembebasan Irian Barat yang berkedudukan di Makassar. Soeharto yang saat itu berpangkat Mayor Jenderal ditunjuk menjadi pimpinan operasi.

⁸ Alua, Agus A, Dialog nasional Papua dan Indonesia, 26 Februari 1999: “Kembalikan Kedaulatan Papua Barat, Pulang dan Renungkan Dulu”, Sekretariat Presidium Dewan Papua dan Biro Penelitian STFT Fajar Timur, Jayapura, 2002.

Langkah politik Soekarno terbukti berhasil memperkuat diplomasi pengembalian Irian, bahkan menjadi salah satu faktor yang mendorong pihak Amerika Serikat mendesak Belanda untuk mengembalikan Irian bagian barat kepada Indonesia lewat PBB. Pada Perjanjian New York, Belanda akhirnya menyetujui penyerahan sementara Papua barat ke tangan PBB melalui United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA). Dan pada 1 Oktober 1962, Belanda pun meninggalkan Irian Barat yang telah dikuasainya selama lebih dari satu setengah abad dan menyerahkan kepada PBB, sebelum akhirnya diberikan sepenuhnya kepada Indonesia pada 1 Mei 1963. Kedudukan Papua Bagian Barat menjadi lebih pasti setelah diadakan sebuah referendum *act of free choice* pada tahun 1969 sebagai pelaksanaan amanat *New York Agreement*, dimana rakyat Papua Bagian Barat memilih untuk tetap menjadi bagian dari Indonesia.⁹ Jadilah sisi timur Indonesia berbatasan langsung dengan New Guinea Timur yang saat itu masih di bawah kekuasaan Australia atas mandat Kerajaan Inggris.



Gambar 3. Pepera di Papua. Sumber: KabarPapua.net

⁹ Ada perbedaan persepsi mengenai referendum di Papua. Bagi sejumlah kalangan di Papua, referendum mestinya dilaksanakan dengan cara *one man one vote*, dan bukannya sistem perwakilan sementara. Hal tersebut kemudian menjadi titik awal bagi lahirnya organisasi separatisme OPM.

3. Perjanjian Indonesia-Australia tentang Garis Batas Wilayah di Papua

Sebagai negara merdeka dan berdaulat, Indonesia mulai menata daerah-daerah perbatasannya dengan negara tetangga. Di sisi timur, Indonesia yang berbatasan langsung dengan Papua Timur melakukan komunikasi-komunikasi dengan pemerintah Australia berkenaan dengan garis demarkasi. Perlu diketahui bahwa Selama Perang Dunia I, Australia telah menduduki sebagian New Guinea Timur yang dulu dikuasai Inggris (New Guinea Timur belahan selatan). Lalu sesuai PD II, sebab Jerman menderita kekalahan perang, Australia oleh PBB diberi mandat untuk memerintah bekas Nugini Jerman (New Guinea Timur belahan utara). Alhasil, Australia menjadi penguasa tunggal atas wilayah Papua Timur. Dan meski secara hukum masih milik Britania, namun Papua Timur dianggap sebagai Wilayah Eksternal Persemakmuran Australia.

Sebagai tindak lanjut Konvensi tahun 1895 antara Belanda dan Inggris, pemerintah Indonesia dan Australia menggelar pertemuan di Jakarta yang berlangsung pada 31 Juli hingga 4 Agustus 1964. Mereka sepakat untuk melakukan demarkasi batas darat antara Indonesia dan Papua New Guinea. Kesepakatan tersebut direalisasikan dengan survei demarkasi batas yang dilaksanakan dari tahun 1966 sampai dengan 1967.

Pada survei demarkasi tersebut didirikan 14 buah monumen meridian batas. Titik-titik tersebut ada di 141° Bujur Timur, mulai dari pilar MM1 sampai dengan MM10. Selanjutnya mulai dari pilar MM11 sampai dengan pilar MM14 berada pada meridian $141^{\circ} 01' 10''$. Pilar MM10 dan MM11 batas kedua negara mengikuti Thalweg dari sungai Fly. Secara teknis, kedua negara sama-sama menggunakan suatu datum dan kerangka referensi bersama yaitu datum dan kerangka referensi astronomis. Realisasi dari kerangka referensi astronomis tersebut berdasarkan posisi bintang yang

diperoleh dari kalender bintang.¹⁰ Lalu persetujuan perbatasan dengan pemerintah Australia secara resmi ditandatangani di Cemberra pada 15 Mei 1973.

Dalam dokumen perjanjian tersebut disebutkan:

(a) In the north the boundary is the meridian of Longitude 141° East extending southwards from the point of the intersection of the meridian with the mean low water line on the northern coast, located at Latitude 2° 35' 37" South, to the point of its most northerly intersection with the waterway (Thalweg) of the Fly River and that meridian shall be deemed to lie along the geodesic lines successively linking the markers MM1, MM2, MM3, MM4, MM5, MM6, MM7, MM8, MM9 and MM10 established by the Joint Survey and indicated on the chart annexed to this Agreement.

(b) From the point of the most northerly intersection of the meridian of Longitude 141° East with the waterway (Thalweg) of the Fly River (at present located at Latitude 6° 19' 24" (South) the boundary lies along that waterway to the point of its most southerly intersection with the meridian of Longitude 141° 01' 10" East (at present located at Latitude 6° 53' 33" South).

(c) From the last-mentioned point the boundary is the meridian of Longitude 141° 01' 10" East extending southwards to the point of latitude 9° 08' 08" South (Point 83 shown on the chart annexed to this Agreement) and that meridian shall be deemed to lie along the geodesic lines successively linking the markers MM11, MM12, MM13 and MM14 established by the Joint Survey and indicated on the chart annexed to this Agreement.¹¹

¹⁰ Silvester Sari Sai, Hasanuddin Z. Abidin & Sobar Sutisna, Aspek Geodetik Penegasan Batas Darat Indonesia dan Papua New Guinea: Status dan Permasalahannya,

¹¹ Dokumen *Agreement Between Indonesia And Australia Concerning Certain Boundaries Between Indonesia And Papua New Guinea*, 1973, pdf.

4. Masa Kemerdekaan Papua New Guinea dari Australia

Pemilu 1972 Australia dimenangkan Partai Buruh. Gough Whitlam yang di masa kampanye pernah menjanjikan kemerdekaan pada Papua New Guinea, menepatinya saat ia terpilih menjadi Perdana Menteri Australia. Whitlam kemudian mempersiapkan infrastruktur politik yang diperlukan bagi kemerdekaan PNG, salah satunya dengan memfasilitasi pembentukan pemerintah PNG pada 1 Desember 1972. Hingga akhirnya, pada tanggal 16 September 1975, PNG berhasil menjadi sebuah negara merdeka. Satu bulan kemudian, tepatnya pada 10 Oktober 1975, PNG bergabung dengan PBB.

Sebagai negara yang sama-sama telah berhasil lepas dari kekuasaan kolonial, pemerintah RI dan PNG menjalin hubungan bilateral dan mulai berusaha membenahi daerah perbatasan kedua negara yang masih belum tertata. Antara tahun 1983-1991, sesuai amanat Pasal 9 Perjanjian 1973 antara Indonesia dengan Papua Nugini,¹² telah didirikan 38 Pilar MM. Ditambah yang sudah ada, maka kini telah berdiri 52 pilar MM di sepanjang garis perbatasan RI dan PNG.

¹² *Article 9: 1. The coordinates of the points specified in this Agreement are geographical coordinates. The actual location of any points or lines referred to in this Agreement which have not yet been determined shall be determined by a method to be agreed upon by the competent authorities of the Government of Indonesia and the Government of Australia. 2. For the purpose of paragraph 1 of this Article the competent authorities shall be the Chief of the Coordinating Body for National Survey and Mapping (Ketua Badan Koordinasi Survey Dan Pemetaan Nasional) of Indonesia and any person acting with his authority, and the Director of National Mapping of Australia and any person acting with his authority. Ibid.*

Tabel 1. Posisi dan Lokasi Pilar Batas RI-PNG

No.	Pilar Batas (MM)	Lokasi	Lintang	Penanggung Jawab
1	MM. 1	Wutung	2 ⁰ 35' 39"	PNG
2	MM. 2	New Moso	2 ⁰ 40' 42"	RI
3	MM. 2.1	Niau	2 ⁰ 46' 30"	RI
4	MM. 2.2	(Sei) Sangke	2 ⁰ 53' 44"	RI
5	MM. 2.3	Sawan/Samna	2 ⁰ 57' 13"	RI
6	MM. 3.A	Skotiau	3 ⁰ 01' 11"	RI
7	MM. 4.A	Waris Kenandega	3 ⁰ 14' 06"	RI
8	MM. 4.1	Senck	3 ⁰ 17' 57"	RI
9	MM. 4.2	Juwela	3 ⁰ 28' 30"	RI
10	MM. 4.3	Kamberatoro/amgotro	3 ⁰ 34' 26"	RI
11	MM. 4.4	Pananggan Track	3 ⁰ 39' 17"	RI
12	MM. 4.5	Kambriap Track	3 ⁰ 39' 26"	PNG
13	MM. 5	Sei Hauser/Wusme	3 ⁰ 55' 16"	PNG
14	MM. 5.1	Biksi	4 ⁰ 03' 38"	PNG
15	MM. 6.A	Sei Sepik	4 ⁰ 08' 39"	PNG
16	MM. 6.1	Batom	4 ⁰ 23' 58"	PNG
17	MM. 6.2	Sei Sepik	4 ⁰ 33' 50"	PNG
18	MM. 6.3	Tumolbil	4 ⁰ 45' 00"	PNG
19	MM. 7	Star Moutain	4 ⁰ 54' 54"	PNG
20	MM. 7.1	Kawentikin	5 ⁰ 08' 41"	PNG
21	MM. 7.2	Kiwirok	5 ⁰ 11' 59"	PNG
22	MM. 7.3	Kugo	5 ⁰ 17' 56"	PNG
23	MM. 7.4	Longoromngo	5 ⁰ 27' 30"	PNG
24	MM. 7.5	Irimkwi	5 ⁰ 29' 34"	PNG
25	MM. 7.6	Bankin	5 ⁰ 33' 55"	PNG
26	MM. 7.7	Kurumkin	5 ⁰ 36' 40"	PNG
27	MM. 8	Inggembit	5 ⁰ 38' 33"	PNG
28	MM. 8.1	Ninati/Opka	5 ⁰ 42' 04"	PNG
29	MM. 8.2	Onombitan	5 ⁰ 47' 23"	PNG
30	MM. 9	Jat	5 ⁰ 52' 39"	PNG
31	MM. 9.1	Atkamban	5 ⁰ 59' 32"	PNG
32	MM. 9.2	Angkeh	6 ⁰ 04' 58"	PNG
33	MM. 10	Angamarut	6 ⁰ 19' 32"	PNG
34	MM. 11.A	Domongi	6 ⁰ 53' 26"	PNG
35	MM. 11.1	Nake Track	7 ⁰ 06' 05"	PNG
36	MM. 11.2	Koropa Track	7 ⁰ 17' 10"	PNG
37	MM. 11.3	Maroa Track	7 ⁰ 27' 16"	PNG
38	MM. 11.4	Obo Track	7 ⁰ 31' 38"	PNG

No.	Pilar Batas (MM)	Lokasi	Lintang	Penanggung Jawab
39	MM. 11.5	Track	7 ⁰ 37' 01"	RI
40	MM. 11.6	Track	7 ⁰ 40' 59"	RI
41	MM. 12	Sei Wawai	7 ⁰ 49' 19"	RI
42	MM. 12.1	Erambu	8 ⁰ 00' 48"	RI
43	MM. 12.2	Kamde	8 ⁰ 02' 36"	RI
44	MM. 12.3	Jalan Trans Irian	8 ⁰ 04' 08"	RI
45	MM. 12.4	Jalan Trans Irian	8 ⁰ 07' 45"	RI
46	MM. 12.5	Jalan Trans Irian	8 ⁰ 11' 58"	RI
47	MM. 12.6	Jalan Trans Irian	8 ⁰ 13' 33"	RI
48	MM. 13	Sota/Botar	8 ⁰ 25' 45"	RI
49	MM. 13.1	Yanggandur Track	8 ⁰ 36' 19"	RI
50	MM. 13.2	Yanggandur Track	8 ⁰ 38' 47"	RI
51	MM. 13.3	Sakiramke	8 ⁰ 52' 29"	RI
52	MM. 14.A	Muara Bensbach	9 ⁰ 07' 34"	RI



Gambar 4. Jalan Trans-Papua. Sumber: Dokumentasi Kementerian PUPR.



Gambar 5. Jalan Trans-Papua penghubung tiga kabupaten di Keerom.
Sumber: *Cendana News*



Gambar 6. Truk-truk terjebak pada kubangan lumpur di jalan lintas Merauke-Boven Digoel. Sumber: Kompas.com

Kini, perbatasan RI-PNG memanjang dari mulai Kota Jayapura, Kabupaten Keerom, Pegunungan Bintang, Boven Digoel, hingga ujung selatan, Kabupaten Marauke. Di lima daerah yang berbatasan langsung dengan PNG itu, pemerintah RI membangun jalur yang disebut sebagai jalan Trans-Papua. Pada tahun 2016 lalu, dari total panjang yang mencapai 4.325 kilometer, pengerjaan jalan sudah diselesaikan hingga 3.720 kilometer, atau telah mencapai 86 persen. Keberadaan Trans-Papua menjadi penting untuk membuka konektivitas ke daerah-daerah di dua provinsi, termasuk yang terisolasi.

B. Profile Kabupaten Keerom yang Berbatasan Langsung dengan Papua New Guinea

Kabupaten Keerom terletak antara $140^{\circ} 15'' 0'$ - $141^{\circ} 0'' 0'$ LS dan $2^{\circ} 37'' 0'$ - $4^{\circ} 0'' 0'$ BT. Topografi wilayah Kabupaten Keerom merupakan lahan dengan kemiringan mencapai 52,2%. Sekitar 44,05% berupa lahan datar dan 2,75% adalah wilayah perbukitan dan rawa. Daerah datar umumnya tersebar di beberapa kawasan di Distrik Astro, Distrik Skanto, Distrik Waris, Distrik Senggi dan Distrik Web. Ketinggian Kabupaten Keerom berkisar antara 0-2.000 m dpl, dimana Distrik Astro, Distrik Astro timur dan Distrik Skanto merupakan daerah terendah dengan ketinggian 0-1.000 m dpl. Sedangkan Distrik Waris, Distrik Senggi, Distrik Web dan Distrik Towe berada pada ketinggian 500-2.000 m dpl. Tekstur laut di Wilayah Kabupaten Keerom adalah 99,36% dan permukaan tanahnya bertekstur halus. Tanah dengan tekstur gambut terdapat di Distrik Senggi yang meliputi 0,42% dari wilayah Kabupaten Keerom.

Di masa pemerintahan Belanda, sebagaimana yang diatur dalam *Besluit Bewindsregelling* Nieuw Guinea, wilayah Keerom disebut sebagai *Onderafdeeling* Keerom yang berada di bawah pemerintahan *afdeeling* Hollandia. Satu *onderafdeeling* terbagi ke dalam beberapa distrik yang dikepalai oleh seorang *districthoof* atau *bestuur*. Di tahun 1940, untuk pertama kalinya Pos Pemerintahan/Distrik didirikan di Yamas yang dipimpin oleh Bestuur Yakob Tabu. Pada tahun 1942, pos tersebut dipindahkan ke Wemby dan seterusnya dipindahkan ke Arso pada tahun 1944. Di tahun 1942, juga dibuka distrik baru di wilayah Waris di bawah pimpinan Bestuur Ohee. Dari tahun 1943 hingga tahun 1959, Bestuur D. Demonggeng mengepalai pos pemerintahan di Desa Yafi (Yabanda).

Pada tahun 1959, pos pemerintahan yang semula berkedudukan di Desa Yabanda dipindahkan ke Oebroeb (Web) dan merubah statusnya menjadi Pemerintahan *Onderafdeeling* Keerom yang dikepalai oleh Hoofd Van Plaatselijck dan Bestuur Mr. Lind (Kepala Pemerintahan

Setempat). Sejak 1 Juni 1950, Nederland Nieuw Guinea yang semula berstatus *Neolandschap* diubah menjadi *Zelfbestuurend Landschap*. Setelah integrasi, KPS Ubrub dikepalai oleh Yosep Leroux, kemudian Alberth Sitorus hingga tahun 1974. Pada tahun 1974, wilayah Keerom terbagi menjadi empat kecamatan, yaitu Web, Senggi, Waris dan Arso. Pada tahun 1978, wilayah Keerom dibentuk sebagai suatu Wilayah Pembantu Bupati. Di tahun 1991, Wilayah Pembantu Bupati Keerom diubah menjadi Badan Koordinasi Pemerintahan (Bakorpem) Wilayah Keerom, yang dipimpin oleh Drs. Billy Jamlean. Hingga kemudian, berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2002 tanggal 11 November 2002, wilayah Bakorpem Keerom dibentuk menjadi suatu wilayah kabupaten baru dengan nama Kabupaten Keerom.

Di tahun 2006, Pemerintah Kabupaten Keerom memiliki lima distrik dan 48 kampung. Namun pada tahun 2007 terjadi pemekaran distrik, sehingga saat ini Kabupaten Keerom memiliki tujuh distrik dan 61 Kampung. Dilihat dari komposisi jumlah kampung, Distrik Arso memiliki jumlah kampung terbanyak, yaitu sebanyak 17 kampung. Sedangkan Distrik Waris, Distrik Senggi dan Distrik Web memiliki jumlah kampung paling sedikit, yaitu masing-masing berjumlah enam kampung.

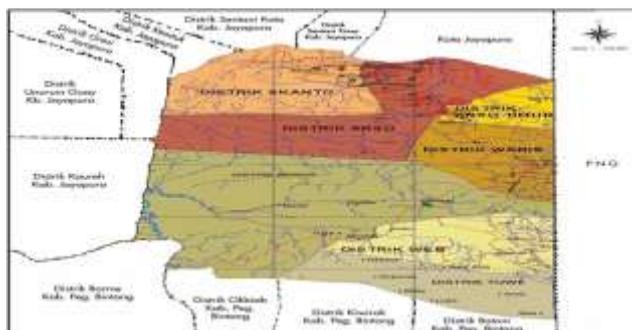
Tabel III. Nama Distrik, Ibukota Distrik dan Jumlah Kampung di Kabupaten Keerom.

No	Distrik	Ibukota	Jumlah Kampung	Luas Wilayah Area	
				KM2	%
1.	Arso	Arso Kota	17	2.097,36	22,40
2.	Skanto	Jaifuri	8	1.504,66	16,07
3.	Waris	Pund	6	1.94	9,74
4.	Senggi	Senggi	6	3.088,55	32,98
5.	Web	Ubruk	6	1.762,50*	18,82
6.	Arso Timur	Yetty	11	-	-
7.	Towe	Towe Hitam	7	-	-
Jumlah			61	9.365,00	100,00

Sumber: Bag. Pemerintahan kab. Keerom tahun 2008

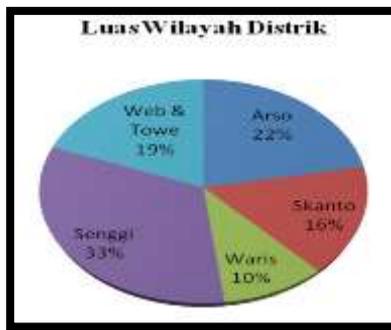
Secara geografis, Kabupaten Keerom berbatasan langsung dan berada memanjang di daerah Perbatasan RI-PNG. Kabupaten dengan luas wilayah 9.365 km² ini memiliki batas-batas wilayah administratif sebagai berikut:

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan Kota Jayapura;
- 2) Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Pegunungan Bintang;
- 3) Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Jayapura, dan;
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan PNG.



Gambar 7. Peta Kabupaten Keerom

Distrik Senggi merupakan daerah terluas yaitu 3.088,55 km² atau sebesar 32,98% dari total luas Kabupaten Keerom. Sedangkan Distrik Waris merupakan daerah terkecil dengan luas 911,94 km² atau sebesar 9,74% dari luas keseluruhan.



Gambar 8. Luas Distrik

Kebijakan menjadikan kecamatan atau distrik sebagai pusat pelayanan masyarakat (Pusyanmas) telah meningkatkan peran kepala distrik sehingga bisa secara optimal mengembangkan kawasan perbatasan Kabupaten Keerom. Distrik Towe memiliki jarak terjauh dari ibukota kabupaten, yaitu sejauh 200 km, dan sampai saat ini cara tercepat untuk mencapai distrik tersebut masih harus ditempuh lewat jalur udara. Hal ini dikarenakan belum adanya infrastruktur jalan dan transportasi darat menuju distrik tersebut. Untuk menjangkau Distrik Towe hanya dapat ditempuh dengan jalan kaki. Table berikut menunjukkan jarak dari ibukota distrik ke ibukota Kabupaten Keerom sekaligus memberikan keterangan distrik-distrik yang berbatasan langsung dengan PNG:

Tabel II. Jarak dari Ibukota Distrik ke Ibukota Kabupaten

No	Distrik	Jarak (Km)	Keterangan
1.	Arso	0	-
2.	Skanto	30	-
3.	Waris	47	Wilayah Perbatasan
4.	Senggi	105	Wilayah Perbatasan
5.	Web	110	Wilayah Perbatasan
6.	Arso Timur	60	Wilayah Perbatasan
7.	Towe	200	Wilayah Perbatasan

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Keerom, 2008

1. Profile Kependudukan Kabupaten Keerom

a. Populasi

Jumlah penduduk Kabupaten Keerom pada tahun 2008 berdasarkan angka proyeksi berjumlah 43.920 jiwa. Penduduk laki-laki merupakan populasi terbesar yaitu 23.528 jiwa atau sebesar 53,57% dari seluruh penduduk Kabupaten Keerom. Sedangkan penduduk perempuan berjumlah 20.392 jiwa atau 46,43% dari keseluruhan jumlah penduduk. Dengan luas wilayah sebesar 9.365 km², berarti kepadatan penduduknya hanya mencapai lima orang per kilometer persegi. Kepadatan penduduk tertinggi ada di Distrik Arso yaitu sebelas orang per kilometer persegi. Sedangkan yang terendah di Distrik Senggi yang hanya satu orang per kilometer persegi.

Jumlah penduduk yang masih relatif sedikit, juga dibarengi dengan tingkat pendidikan penduduk Keerom yang masih rendah. Sebanyak 2.166 orang (7,39%) tidak/belum pernah sekolah; 6.382 orang (21,78%) tidak/belum tamat SD; 7.390 orang (25,22%) telah tamat SD, dan; yang telah tamat SLTP/ sederajat sebanyak 7.268 orang (24,80%). Sedangkan yang telah menamatkan SMU/ sederajat hanya 3.260 orang (11,12%). Bahkan yang berpendidikan Sarjana hanya mencapai 1,85% atau sebanyak 543 orang.

b. Keagamaan

Pada tahun 2008, menurut data Departemen Agama, jumlah penduduk pemeluk agama Islam sebanyak 20.927 orang atau 47,6%; pemeluk agama Kristen dan Katolik masing-masing sebanyak 10.447 orang (23,7%) dan 12.282 (27,96%); 18.486 orang atau 39,63%, dan; pemeluk agama Hindu dan lainnya kurang dari satu persen dari total jumlah penduduk Kabupaten Keerom.

c. Ketenagakerjaan

Dari 21.485 penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu, sebanyak 15.632 orang (72,76%) bekerja di sektor pertanian. Jumlah penduduk laki-laki berusia 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu

yang lalu sebanyak 13.413 orang atau mencapai 62,43% dari total penduduk Keerom usia 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu. Jumlah PNS di Kabupaten Keerom pada Oktober 2008 adalah 2.004 orang, dimana hampir setengahnya (981 orang) merupakan lulusan SMA/SMK. Jumlah terbanyak kedua yaitu lulusan S-1 yang tercatat sebanyak 513 orang (25,60%).

d. Infrastruktur

1. Listrik

Pada tahun 2008, Kabupaten Keerom memiliki lima unit pembangkit listrik dengan kapasitas terpasang sebesar 2.800 KW dan kemampuan mesin sebesar 2.440 KW. Semua pembangkit listrik tersebut terdapat di Distrik Arso dan satu di Distrik Senggi. Tenaga listrik yang diproduksi sebesar 8.382.636 KWH, angka yang sama juga tercatat pada jumlah listrik yang dialirkan, sedangkan jumlah listrik yang terjual sebesar 7.353.363 KWH. Besarnya listrik yang terjual melebihi listrik yang diproduksi dikarenakan sebagian listrik yang dijual tersebut disuplai dari PLTD Waena. Jumlah pelanggan listrik di Distrik Arso sebanyak 3.752 pelanggan atau 51,26% dari seluruh pelanggan di Kabupaten Keerom. Sedangkan di Distrik Skanto, Distrik Senggi dan Distrik Arso Timur, masing-masing memiliki 2.897 pelanggan (39,58%), 110 pelanggan (1,50%) dan 560 pelanggan (7,65%). Penjualan listrik terbesar diarahkan pada pelanggan rumah tangga yaitu sebesar 5.550.729 KWH atau sebesar 77,52%. Sedangkan yang terkecil ada pada pelanggan industri, yaitu sebesar 565 KWH atau 0,0079% dari seluruh daya listrik yang terdapat di Kabupaten Keerom.

Berdasarkan pengakuan dan pengamatan di lapangan, pada umumnya masyarakat di kawasan perbatasan belum menikmati pelayanan listrik secara merata. Bagi masyarakat mampu, mereka menggunakan generator. Tapi bagi yang tidak mampu, mereka hanya menggunakan lampu (pelita) minyak tanah, kayu bakar, dan lilin.

2. Jalan

Panjang jalan di Kabupaten Keerom terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2008, panjang jalan di Kabupaten Keerom mencapai 750.060 km atau meningkat 6,79% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jalan dengan permukaan aspal sepanjang 50.000 km atau lebih panjang 1.500 km dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2007, panjang jalan provinsi tidak mengalami perubahan dibanding tahun 2006. Sedangkan panjang jalan kabupaten pada tahun 2007 sepanjang 750,06 km atau naik 6,79% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Kesehatan

Pada pembangunan infrastruktur di bidang kesehatan, pada tahun 2006 jumlah Puskesmas Pembantu sebanyak 33 unit atau bertambah tiga unit bila dibandingkan dengan tahun 2005, atau meningkat sepuluh persen. Pada tahun 2007, Puskesmas Pembantu bertambah menjadi 34 unit dan juga pada tahun 2008 masih memiliki jumlah yang sama dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2008, terdapat 12 orang dokter, 106 orang perawat, 21 orang non perawat dan 42 orang tenaga non medis. Realisasi dari target imunisasi seluruh jenis hampir semuanya mengalami peningkatan. Jumlah penduduk yang mendapat vaksinasi BCG selama tahun 2008 adalah 1.084 orang (93,1%). Jumlah penderita penyakit berbagai jenis yang dilaporkan pada Dinas Kesehatan selama tahun 2008 tercatat sebanyak 71.311 penderita. Penderita terbanyak adalah penderita ISPA dengan 22.906 penderita. Banyaknya persalinan pada tahun 2008 adalah sebanyak 785 atau naik 27,66% dibanding tahun 2007.

Kendala yang dihadapi dalam pelayanan bidang kesehatan antara lain kurangnya tenaga kesehatan dokter maupun perawat yang mau mengabdikan dirinya di kawasan perbatasan. Belum ada petugas kesehatan yang bersedia tinggal di kawasan perbatasan. Mereka hanya datang berkunjung pada hari-hari tertentu dan kembali lagi ke ibukota Kabupaten Keerom atau ke Kota Jayapura. Hal tersebut

membuat masyarakat sulit mendapatkan layanan kesehatan yang siaga apabila dibutuhkan.

2. Potensi Ekonomi Kabupaten Keerom

Produksi padi tahun 2008 sebesar 1.777 ton mengalami kenaikan sebesar 8,66% bila dibandingkan tahun 2007 yang tercatat 1.224 ton. Meskipun 88,5% dari produksi padi tersebut disumbang oleh padi ladang, namun rata-rata produksi padi sawah (2,68 ton per ha) lebih tinggi dibandingkan rata-rata produksi padi ladang (2,59 ton per ha). Ubi jalar merupakan jenis tanaman pertanian dengan produksi terbesar sepanjang tahun 2008, yaitu sebesar 2,848 ton, sedangkan produksi terendah terjadi pada kacang hijau yang hanya 22 ton. Produksi seluruh jenis sayur-sayuran yang terdapat di Kabupaten Keerom mengalami kenaikan di tahun 2008. Tanaman sayur-sayuran yang rata-rata mengalami peningkatan hasil produksi cukup besar adalah tanaman kubis, yang mengalami kenaikan produksi 22,07% menjadi 531 ton. Jika dilihat dari nilai produksinya, jenis sayuran dengan produksi terbesar adalah tomat yang mencapai 633 ton.

Luas panen kelapa sawit yang dikelola oleh PTPN II Arso tahun 2008 seluas 8.459 ha. Sebagian besar dari lahan yang dikelola merupakan areal plasma dengan luas 3.600 ha. CPO yang dihasilkan dari perkebunan kelapa sawit mengalami fluktuasi setiap bulannya selama tahun 2008. Jumlah produksi terbesar terjadi pada bulan Oktober dan Desember. Produksi tanaman perkebunan masih didominasi perkebunan sawit dan perkebunan kakao. Luas panen sawit seluas 10.195 ha dengan jumlah produksi sebesar 77.070 ton. Sedangkan luas panen kakao di Kabupaten Keerom seluas 2.584 ha dengan jumlah produksi sebesar 4.833 ton.

Kabupaten Keerom memiliki hutan dengan berbagai jenis penggunaan sebesar 942.157,31 ha. Dari jumlah tersebut, 329.370,09 ha adalah hutan lindung yang merupakan jenis hutan terluas di Kabupaten Keerom. Sedangkan di sektor peternakan, jenis peternakan terbesar tahun 2008 adalah ayam buras dengan jumlah sebanyak 39.221 ekor atau mengalami

kenaikan 11,46% dibanding dengan tahun sebelumnya. Kedua adalah peternakan sapi dan babi, masing-masing mengalami kenaikan sebesar 10,6% dan 8,72%. Populasi sapi turun 2,76% dibandingkan jumlahnya tahun 2007, menjadi 7.669 ekor.

C. Masyarakat Adat di Kabupaten Keerom

1. Suku dan Wilayah Adat

Masyarakat adat di atas tanah Papua terbagi dalam tujuh wilayah adat budaya. Wilayah I disebut dengan wilayah adat budaya Tabi atau Mamta yang meliputi suku-suku yang mendiami dataran sungai Mamberamo sampai Sungai Tami. Wilayah II disebut wilayah adat budaya Saireri yaitu suku-suku yang mendiami wilayah Teluk Saireri. Wilayah III disebut wilayah adat budaya Doberay yaitu meliputi suku-suku yang mendiami daerah kepala burung. Wilayah IV disebut wilayah adat budaya Bomberai yang meliputi suku-suku yang mendiami daerah Teluk Bintuni hingga ke Mimika. Wilayah V disebut wilayah adat budaya Ha-Anim yaitu wilayah suku-suku yang mendiami daerah antara Asmat sampai Kondo (Merauke). Wilayah VI adalah wilayah adat budaya La Pago yang meliputi suku-suku yang mendiami daerah pegunungan Tengah bagian Timur. Dan Wilayah VII adalah wilayah adat budaya Me Pago yang meliputi suku-suku yang mendiami daerah pegunungan tengah bagian barat.

Berdasarkan pembagian wilayah hukum adat-budaya Papua, Provinsi Papua Barat adalah wilayah adat budaya Doberay dan Bomberai dari manusia Papua di Tanah Papua, Indonesia. Manusia Papua yang menempati wilayah Adat Budaya Doberai dan Bomberay Papua Barat secara adat budaya asli mempunyai keterikatan sosial dengan sesama maupun dengan alam di sekitarnya. Keterikatan itu bisa dilihat dari interaksi dan komunikasi mereka terhadap alam dan manusia sesama. Ciri inilah yang membedakan mereka dengan komunitas adat budaya Papua di ke lima daerah lainnya.¹³

Di Kabupaten Keerom, terdapat 18 suku dan 229 marga atau keret. Predikat “penduduk asli” dan “masyarakat adat” di Kabupaten Keerom mestinya menunjuk ke delapan

¹³ Andreas Jefri Deda dan Suriel Semuel Mofu, Masyarakat Hukum Adat Dan Hak Ulayat di Provinsi Papua Barat Sebagai Orang Asli Papua Ditinjau dari Sisi Adat dan Budaya; Sebuah Kajian Etnografi Kekinian, Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 Nomor 2, Oktober 2014.

belas suku tersebut. Secara adat, Kabupaten Keerom dibagi dalam empat wilayah adat. Setiap wilayah adat terdiri dari beberapa suku dan marga yang menguasai hak ulayat. Hak ulayat dikuasai oleh masing-masing keret yang ditandai oleh batas alam seperti sungai, bukit, atau lembah. Empat Wilayah Adat di Keerom yaitu:

1. Wilayah Adat Arso yang meliputi Distrik Arso, Arso Timur dan Distrik Skamto.
2. Wilayah Adat Waris meliputi seluruh wilayah Distrik Waris.
3. Wilayah Adat Senggi meliputi seluruh wilayah Distrik Senggi.
4. Wilayah Adat Web meliputi wilayah Distrik Web dan wilayah Distrik Towe.

2. Pola Hidup Masyarakat kabupaten Keerom

Mata pencaharian masyarakat asli Keerom (terutama sebelum daerah ini terbuka untuk perkebunan sawit) adalah meramu. Mereka hidup dari kemurahan alam yang kaya. Makanan pokok mereka adalah sagu. Sumber protein berasal dari hewan buruan seperti babi hutan, tikus tanah, burung, dan berbagai jenis ikan. Beberapa hal yang menjadi ciri khas dalam kehidupan mereka adalah:

1. Berpindah-pindah (rotasi).
2. Mahir menggunakan peralatan dan senjata tradisional.
3. Menguasai lingkungan alam sekitarnya, mahir mencari sumber makanan dan sumber air untuk kehidupannya.
4. Tingkat populasinya rendah.
5. Berkat tempaan alam, fisik dan daya tahan hidupnya kuat.
6. Tidak mengenal konservasi sumber daya alam (karena hidupnya sebenarnya berada dalam konservasi itu sendiri).

7. Hidup menetap dekat tempat kerjanya (lahan pertanian).
8. Berusaha menyerap teknologi baru yang berkaitan dengan peningkatan produksi pertanian, meskipun pekerjaan masih dilakukan dengan tenaga manusia.
9. Menguasai jenis tanaman dan hewan yang sesuai dengan lingkungan alamnya.



Gambar 9. Budaya Keerom asal Distrik Waris. Pertunjukan digelar pada pesta adat Keerom agenda pengukuhan Ketua DAK Keerom di Kampung Ampas, Distrik Waris. Sumber: HU Bintang Papua.

Komponen alam paling penting dari masyarakat asli Keerom adalah hutan. Di hutan, terdapat berbagai macam tumbuhan dan hewan yang dibutuhkan untuk keberlangsungan hidup mereka. Hutan telah menjadi bank makanan alami warisan nenek moyang bagi masyarakat. Aktivitas di dalam hutan meliputi berburu binatang, mencari ikan, mencari sayur, mencari sagu, mengumpulkan kayu bakar, sumber obat-obatan alami, menebang pohon untuk diambil kayunya yang kemudian dijadikan tiang, dinding, juga alas rumah. Atap rumah tradisional juga diambil dari hutan. Orang asli Keerom

mengerjakan kebunnya sendiri dengan menebang pohon, membersihkan, membakar, menanam, memelihara, termasuk berburu dan mencari ikan di wilayah sejauh masih menjadi milik marganya. Mereka tidak terikat dengan kredit suatu instansi, kontrak kerja dengan majikan, gaji bulanan dan jam kerja tertentu. Mereka dapat merencanakan suatu program kerja dan memutuskan sendiri kapan pekerjaan tersebut perlu dilaksanakan.

Dalam kesadaran orang Keerom, tidak ada tanah yang milik pribadi. Mereka menghayatinya sebagai hak bersama dalam satu klan. Dan mereka sangat tahu tanah-tanah yang merupakan hak ulayatnya, termasuk batas-batasnya. Di tanah yang menjadi hak ulayatnya itulah mereka menggantungkan hidupnya. Mereka baur dengan alam. Hal tersebut dapat kita lihat juga pada aneka macam perhiasan seperti bulu burung, daun-daun, dan cat-cat yang diambil dari tanah atau dari tumbuhan tertentu. Keerom mengalami perubahan drastis setelah masuknya perkebunan sawit dan program transmigrasi yang berlangsung sejak tahun 1985 hingga kini. Sekitar tahun 1982/1983, potensi hutan tersebut dibabat sedikit demi sedikit.

Sejak tahun 1983-1992, sekurang-kurangnya sudah dibuka lahan seluas 3.600 ha untuk perkebunan sawit. Kawasan yang dahulunya hutan rimba kini telah berubah menjadi perkebunan, pemukiman, lahan sawah-ladang, semak belukar, dan lahan kering. Tataan ekonomi masyarakat pun bergeser. Masyarakat Keerom yang sebelumnya merupakan masyarakat peramu mulai diperkenalkan dengan sistem upah dan sistem kredit yang harus dibayarkan oleh petani setiap kali panen kelapa sawit. Mereka diperkenalkan dengan pola hubungan majikan dan karyawan dengan pola pembagian waktu kerja yang sebelumnya tidak mereka gunakan. Mereka juga diperkenalkan dengan pola penggajian berdasarkan pengetahuan atau tingkat pendidikan. Bagi masyarakat pribumi, itu semua adalah perubahan yang tidak dibayangkan sebelumnya. Pola ekonomi tradisional berubah ke pola ekonomi produktif.

Orang-orang tua dari masyarakat pribumi yang terlibat dalam penerimaan kedatangan perkebunan sawit awalnya

memiliki asumsi bahwa perkebunan sawit akan memberikan kesejahteraan pada anak cucunya. Namun kenyataannya, masyarakat adat di Kabupaten Keerom sampai sekarang masih jauh dari sejahtera. Bahkan kini banyak dari mereka yang merasa dirugikan. Sebagian besar masyarakat asli Keerom saat ini merupakan masyarakat transisi dari masyarakat tradisional ke masyarakat industri dan komunikasi modern. Dengan hadirnya berbagai macam pendatang dari daerah lain seperti Jawa, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua (non Keerom) pada tahun 1982/1983 dalam program transmigrasi, kebudayaan Keerom pun mengalami berbagai pergeseran. Saat ini di Kabupaten Keerom, keseluruhan jumlah penduduk Papua adalah 17.947 sedangkan non Papua mencapai 24.938.¹⁴ Namun tidak demikian hal yang terjadi di beberapa kampung yang berbatasan dengan PNG. Di sana, sebagian masyarakat masih menggantungkan hidup pada kemurahan alam yang ada di tanah ulayatnya. Meski, sebagaimana yang kita ketahui bersama, keberadaan tanah ulayat mereka berada di negeri seberang.

¹⁴ *Partnership for Governance Reform Centre for Learning and Advancing Experimental Democracy Indonesia Forestry and Governance Institute*, Nilai-nilai Dasar Orang Papua dalam Mengelola Tata Pemerintahan (*Governance*): Studi Reflektif Aantropologis, 2012.

D. Masalah-Masalah Perbatasan Keerom – Papua New Guinea

Perbatasan Keerom-PNG memiliki persoalan yang sangat kompleks. Penelitian ini hanya akan mengeksplorasi dua persoalan yang dianggap pokok dan krusial, dimana darinya muncul berbagai varian dan variable persoalan lainnya. Kualifikasi urgensi dari persoalan tersebut tentu saja sangat perspektivialis, terutama menyangkut diskursus kewarganegaraan dengan segenap hak-haknya, juga relevansi mendasar dengan gagasan pembentukan wilayah bersama.

1. Pelintas Batas Tradisional di Perbatasan Keerom – Papua New Guinea

Belanda dan Inggris telah membagi dua pulau Papua lewat Deklarasi Raja Prusia pada 22 Mei 1885. Penetapan garis batas tersebut dilakukan dengan menentukan titik-titik koordinat secara astronomis, sama sekali tanpa pertimbangan topografis dan sosiologis masyarakat setempat. Tak mengherankan jika garis demarkasi berada pada kondisi medan yang sangat sulit dijangkau. Lebih jauh—ini yang kemudian memunculkan persoalan cukup serius di daerah perbatasan RI dan PNG sebagai negara bekas jajahan Inggris dan Belanda, penarikan garis demarkasi telah juga membelah satu komunitas sosial yang memiliki adat kuat terutama yang berkaitan dengan masalah kekerabatan dan tanah ulayat. Hal tersebut berdampak pada kepemilikan tanah ulayat yang secara yuridis diakui, namun di sisi lain, secara *de facto*, keberadaannya telah menerobos batas-batas kedua negara.

Di Keerom, garis perbatasan RI-PNG mencapai 360 kilometer, mencakup lima distrik yaitu distrik Towe, Web, Waris, Arso Timur, dan distrik Senggi. Kelima distrik tersebut mencakup keseluruhan wilayah Adat yang ada di Kabupaten Keerom. Secara fisik, sebagian besar kondisi kawasan perbatasan memiliki kontur wilayah yang bergunung dan berbukit, sehingga sulit ditembus dengan sarana perhubungan biasa atau transportasi roda empat. Sarana perhubungan yang

memungkinkan untuk mencapai kawasan perbatasan adalah pesawat terbang perintis dan pesawat helikopter yang sewaktu-waktu digunakan untuk pejabat dan aparat pemerintah pusat/daerah untuk melakukan kunjungan ke sekitar wilayah perbatasan Indonesia-PNG.

Masyarakat adat di perbatasan Keerom-PNG yang mata pencahariannya sebagai petani, pemburu dan pengumpul hasil hutan lainnya itu menjadi pelaku lintas batas yang aktif dan massif. Pelintasan batas dilakukan untuk kunjungan kekerabatan yang satu sama lain sudah dipisahkan oleh garis demarkasi negara. Pemerintah RI dan pemerintah PNG sendiri mengakui dan mengizinkan pergerakan melintasi perbatasan antarnegara yang dilakukan oleh penduduk tradisional untuk kegiatan tradisional. Kegiatan tradisional yang dimaksud meliputi hubungan sosial dan upacara-upacara adat seperti perkawinan, berkebun, berburu, pengumpulan dan penggunaan tanah, penangkapan ikan dan penggunaan perairan, olahraga, serta kegiatan kebudayaan lainnya. Selain itu, pelintasan batas juga dilakukan dalam rangka aktifitas dagang dengan skala kecil dan menggunakan sistem barter. Biasanya mereka membawa cokelat atau vanili untuk ditukar dengan mie instan, beras, dan kebutuhan pokok lain.

Dalam hal ini, pemerintah RI dan pemerintah PNG melakukan perjanjian tentang pelengkapan para pelintas batas tradisional dengan KLB (Kartu Lintas Batas) sebagai pengganti paspor dan visa. Namun kenyataannya, banyak pelintas batas yang tidak memiliki KLB. Bahkan menurut Suzanna Wanggai, Kepala Badan Perbatasan dan Kerja sama Luar Negeri (BPKLN) Provinsi Papua, seperti dalam salah satu wawancara dengan *Republika.co.id*, cukup banyak warga Indonesia di kawasan perbatasan yang belum beridentitas (KTP).¹⁵

Ada beberapa persyaratan bagi penduduk yang baru membuat KLB (kartu merah) yaitu fotokopi KTP, Kartu

¹⁵ *Republika.co.id*, <https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/mayoritas-warga-perbatasan-tak-punya-ktp/ar-AAjaKBv?li=AAfuHN7>. Diakses pada 31 Maret 2017.

Keluarga, Surat Nikah (bila sudah menikah), dan pas foto 3x4 empat lembar berwarna. Bagi penduduk yang bermaksud mengganti KLB harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: fotokopi Kartu Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Nikah (bila sudah menikah) dan pas foto 3x4 empat lembar berwarna. Bagi anak yang berusia kurang dari 17 tahun, persyaratan yang diminta oleh petugas adalah fotokopi KTP ayah dan ibu, Kartu Keluarga, Akta Lahir, Surat Nikah orang tua, KLB orang tua dan pas foto 3x4 empat lembar berwarna.

Ada tiga kualifikasi bagi yang berhak mendapatkan KLB. Pertama, Penduduk yang lahir di daerah perbatasan RI dan PNG. Kedua, Penduduk yang tinggal di daerah perbatasan RI-PNG. Ketiga, Penduduk yang lahir dan tinggal bukan di daerah perbatasan tetapi menikah dengan penduduk yang lahir dan tinggal di daerah perbatasan. Penduduk yang memiliki KLB diperbolehkan melakukan perdagangan perbatasan tradisional dan kebiasaan di dalam daerah perbatasan. Barang-barang yang diperdagangkan bernilai tidak boleh lebih dari US\$ 300 bagi setiap pemegang KLB per bulannya. Adapun batas waktu bagi pemegang KLB untuk menetap di negeri seberang baik dari RI ataupun PNG adalah 30 hari. Melewati itu, maka yang bersangkutan harus melapor ke kantor imigrasi dengan membawa dokumen-dokumen seperti KTP, akta lahir dan lain-lain.

Ketidaktertiban administratif kependudukan di perbatasan Keerom-PNG sudah berlangsung lama. Impaknya, ada banyak warga negara PNG yang bermukim di wilayah NKRI tanpa dokumen keimigrasian. Begitu juga sebaliknya. Menurut catatan BPKLN Provinsi Papua, dari sekitar 1.000 orang warga PNG yang bermukim di wilayah Papua (tanpa dokumen resmi), sekitar 300 orang bermukim di wilayah Kabupaten Keerom. Anak-anak mereka pun bersekolah di sekolah yang ada di Keerom. Pemerintah sebetulnya sudah menyiapkan sebuah bangunan yang berfungsi sebagai pos lintas batas tradisional di Distrik Waris. Namun sejauh ini, pos belum beroperasi. Berbagai sarana pendukungnya belum ada. Berbeda dengan di Skouw, Jayapura, yang memang merupakan tempat pos perbatasan dengan jalur perlintasan

resmi antara Indonesia-PNG. Letaknya di Distrik Tami, sekitar 80 kilometer dari Kota Jayapura. Di sana, pos perbatasan sudah dilengkapi pos pemeriksaan lintas batas dan gapura perlintasan, baik di sisi Indonesia maupun Papua Nugini. Di Keerom, aktivitas lintas batas lewat jalur tradisional seperti yang ada di distrik Waris terjadi di sepanjang perbatasan dari sisi utara ke selatan. Jalur itu digunakan sejak lama karena adanya hubungan kekerabatan. “Jalan tikus” inilah yang kerap dimanfaatkan untuk melakukan penyelundupan-penyelundupan. Di Papua, secara keseluruhan, jalan tikus yang paling rawan digunakan sebagai jalur penyelundupan berada di Skouwpro dan Yabanda. Keduanya berada di Kabupaten Keerom.

2. Kondisi Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Keerom

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kesejahteraan diartikan sebagai suatu keadaan yang makmur, aman, sentosa, jauh dari gangguan-gangguan.¹⁶ Karenanya, kesejahteraan hampir tidak ada sangkut pautnya dengan wacana modern/tradisional, pembangunan/tertinggal, apalagi angka-angka pada statistik atau grafik IPM di meja penguasa. Sebelum masuknya program transmigrasi, masyarakat perbatasan di Kabupaten Keerom barangkali bisa disebut sebagai masyarakat yang sejahtera: segala kebutuhan hidup telah disediakan alam. Sandang, pangan, papan, obat-obatan, semua tersedia di hutan. Bahkan bisa jadi masyarakat Keerom sebelum era 80-an adalah masyarakat berkelimpahan.

Situasi mulai berubah drastis saat di tahun 1982/1983 pemerintah menggalakan program transmigrasi. Hutan yang menjadi sumber kehidupan masyarakat Keerom mulai dibabat. Dalam rentang 1983 -1992, sedikitnya sudah dibuka lahan seluas 3.600 ha untuk perkebunan sawit. Angka tersebut kemudian melonjak hampir tiga kali lipat di tahun 2006. Menurut laporan dari PTPN II Kebun Arso, luasan panen

¹⁶ KBBI Edisi Ketiga, Balai Pustaka, 2005.

kelapa sawit di tahun 2006 mencapai 8.339 ha.¹⁷ Pada tahun 2010, PT Tandan Sawita Papua (TSP) menjadi perusahaan kedua yang beroperasi di Kabupaten Keerom. Perusahaan PT. TSP dimiliki oleh Green Eagle Group (dulu sebuah usaha patungan antara Rajawali Group dan perusahaan Perancis, Louis Dreyfus Commodities, namun statusnya kini di bawah naungan BW Plantation dengan 43 Rajawali sebagai pemegang saham utama). PT. TSP membabat hutan setelah mendapat izin usaha perkebunan seluas 18.337 ha (dari izin lokasi awal seluas 26.300 ha).¹⁸

Oleh perusahaan baru tersebut, tanah ulayat milik warga yang berupa hutan rimba dibeli dengan harga Rp. 384.000 per hektar. Artinya, tiap meter tanah hanya seharga 38,4 rupiah. Negosiasi pun hanya dilakukan dengan para kepala marga dan tokoh masyarakat laki-laki. Setelah empat tahun beroperasi, PT TSP tidak juga berbagai fasilitas pendidikan dan kesehatan sebagaimana yang sudah dijanjikan sebelumnya. Riwayat pembabatan hutan di Kabupaten Keerom tak berhenti sampai di situ. Di Arso Kota, Workwana dan Wambes, yang kemudian lebih sering disebut sebagai *Segitiga Emas*¹⁹ orang Keerom, PT. Victory Cemerlang Indonesia Wood Industries sudah mendapatkan izin untuk membuka perkebunan kelapa sawit seluas 4.885 ha.²⁰ Perusahaan lainnya

¹⁷ Badan Pusat Statistik (BPS), Keerom Dalam Angka 2007, Keerom: BPS, 2007.

¹⁸ Atlas Sawit Papua: di Bawah Kendali Penguasa Modal, Penyunting: Y.L. Franky dan Salwyn Morgan, Pusaka, Jakarta, 2015.

¹⁹ Orang Keerom menyebut Segitiga Emas untuk hutan di tiga wilayah (Workwana, Wambes dan Arso Kota) karena hutan tersebut menjadi sumber penghidupan masyarakat setempat, termasuk di dalamnya terdapat tempat-tempat yang dianggap keramat. Istilah ini muncul saat dilakukan pemetaan yang mulai dirintis pada tahun 1992 dan kemudian diselesaikan menjadi peta bersama pada tahun 2004. Hasil pemetaan tersebut kemudian menjadi rujukan peta kabupaten Keerom yang memutuskan wilayah Segitiga Emas sebagai bagian dari hutan lindung. Wilayah itu milik masyarakat di Workwana, Wambes dan Arso Kota.

²⁰ Aliansi Demokrasi untuk Papua, <http://www.aldp-papua.com/pt-victory-diduga-akan-merusak-segitiga-emas-orang-keerom/>, diakses 1 April 2017.



Gambar 11. Masyarakat adat Keerom mengugut kembali tanah ulayatnya. Sumber: Portal Berita Tanah Papua

Hutan dibabat. Pertanian tak berke m b a n g. Sumber penghidupan pun jadi tak pasti. Batang kayu dan ranting-ranting yang bergeletakan di areal yang akan dijadikan per-

kebunan dibiarkan mengering lalu dibakar. Binatang-binatang hutan menyingkir jauh ke pedalaman. Pohon-pohon sagu, daun gnemo, sayur paku, semua menghilang. Hutan sebagai anugerah alam yang telah menghidupi masyarakat Keerom dari generasi ke generasi perlahan mulai habis, digantikan hamparan sawit yang milik segelintir orang. Untuk mendapatkan sagu, babi, ikan, burung, atau kayu, orang Keerom kini harus masuk ke pedalaman hutan yang berjarak berhari-hari jalan kaki.

Saat ini sekitar 95% masyarakat pribumi Keerom telah melepaskan lahannya untuk dikontrakkan. Mereka hanya memperoleh sekitar Rp 300.000 per bulan. Penduduk yang telah mengontrakkan lahan sawitnya kemudian mencari aktifitas produktif lainnya. Beberapa pola bisa ditemukan. Pertama, membuka kebun sambil sesekali masih pergi ke hutan mencari makanan berupa sayur dan daging. Kedua, kembali ke pola lama yaitu berusaha mendapatkan makanan (sayur, daging, ikan) dari hutan. Ketiga, alih profesi menjadi penjual pinang atau tukang ojek. Namun tidak sedikit juga yang sudah enggan ke kebun dan hutan. Mereka umumnya tinggal di sekitar kampung dengan keadaan yang alakadarnya.²³

²³ *Partnership for Governance Reform Centre for Learning and Advancing Experimental Democracy Indonesia Forestry and Governance Institute, Op.cit.*



Gambar 12. Hutan Keerrom. Sumber: Greenpeace.



Gambar 13. Pembabatan Hutan Keerrom oleh Perusahaan Sawit.
Sumber: Greenpeace.

Berikut beberapa yang dapat dijadikan indikator bagi keadaan masyarakat perbatasan RI-PNG yang berada di Kabupaten Keerom, dikutip dari Rangkuman Hasil Penelitian Proyek *Strengthening of Border and Improvised Region Integrity and Governance (SOBERING)*, Kemitraan Partnership 2015:

Air Bersih

Pelayanan air bersih di kawasan perbatasan belum berjalan dengan baik. Masyarakat sering kesulitan mendapatkan air bersih. Sumber air bersih untuk kepentingan sehari-hari diperoleh dari mata air yang ada di wilayah terdekat, yang kadang-kadang tercemar

lantaran masyarakat juga membuang kotoran dekat sumber air tersebut.

Listrik

Berdasarkan pengakuan dan pengamatan di lapangan, pada umumnya masyarakat di kawasan perbatasan belum menikmati pelayanan listrik secara merata. Bagi masyarakat mampu, mereka menggunakan generator. Tapi bagi yang tidak mampu, mereka hanya menggunakan lampu (pelita) minyak tanah, kayu bakar, dan lilin.

Pendidikan

Pemerintah di Kabupaten Keerom sebenarnya sudah menyiapkan infrastruktur pendidikan di tiap distrik di kawasan perbatasan, walaupun belum maksimal. Ada beberapa kendala pelayanan di bidang pendidikan, antara lain:

- i. Masyarakat belum sadar akan pentingnya pendidikan bagi masa depan mereka. Berdasarkan pengakuan Bapak Essau, seorang guru di Wandes, orang tua siswa bahkan sering tidak mengizinkan anaknya pergi bersekolah, dan lebih memilih membawa mereka ke tempat kerja atau berdagang di Kota Jayapura dan sekitarnya.
- ii. Kurangnya tenaga guru yang mau mengabdikan dirinya ke kawasan perbatasan.

Kesehatan

Kendala yang dihadapi dalam pelayanan bidang kesehatan antara lain kurangnya tenaga kesehatan dokter maupun perawat yang mau mengabdikan dirinya di kawasan perbatasan. Belum ada petugas kesehatan yang bersedia tinggal di kawasan perbatasan. Mereka hanya datang berkunjung pada hari-hari tertentu dan kembali lagi ke ibukota Kabupaten Keerom atau ke Kota Jayapura. Hal

tersebut membuat masyarakat sulit mendapatkan layanan kesehatan yang siaga apabila dibutuhkan.

Infrastruktur

Beberapa masyarakat memberikan informasi bahwa mereka mengalami kendala karena tidak tersedianya akses jalan menuju perbatasan. Beberapa bagian wilayah tidak dapat dijangkau karena tidak tersedianya jalan yang memadai ke tempat tersebut.

Masyarakat perbatasan Keerom-PNG masih jauh dari sejahtera. Kecuali masalah listrik, indikator-indikator di atas masih cukup representatif dan presisi untuk menggambarkan kondisi masyarakat perbatasan Kabupaten Keerom hari ini.²⁴ Berdasar laporan pemerintah Kabupaten Keerom di website resminya, PDRB Kabupaten Keerom pada tahun 2014 hanya 1,87 triliun rupiah dengan nilai PDRB perkapita Rp. 35,33 juta. Bandingkan dengan Kabupaten tetangga, Mimika, yang PDRB-nya mencapai Rp. 46,52 triliun dengan pendapatan perkapita Rp. 295 juta.²⁵

3. Fenomena Kriminalitas Lintas Batas Perbatasan Keerom – Papua New Guinea

Kriminalitas lintas batas yang terjadi di perbatasan RI-PNG umumnya berupa penyelundupan komoditas-komoditas yang bersifat komersial seperti BBM, kayu, dan kakao dari Papua Indonesia, dan vanilla asal PNG, bahkan narkoba dan senjata api. Faktor mendasar yang melatarbelakangi

²⁴ Berdasarkan **SIARAN PERS Nomor: 00032.Pers/04/SJI/2017 Tanggal 10 Maret 2017** Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, delapan kampung di perbatasan Keerom-PNG telah merasakan listrik 24 jam. Tentu saja itu hanya mencakup sebagian kecil masyarakat perbatasan di Kabupaten Keerom. Sebab dari total 61 kampung, lima Distrik yang berbatasan langsung dengan PNG mencakup 36 kampung. Lihat <http://ebtke.esdm.go.id/post/2017/03/11/1589/delapan.desa.di.perbatasan.indonesia-papua.nugini.merasakan.listrik.24.jam>. Diakses pada 16 Maret 2017.

²⁵ Website Resmi Pemerintah Kabupaten Keerom dan Pemerintah Kabupaten Mimika.

kriminalitas di perbatasan adalah persoalan kesejahteraan. Adapaun aksi-aksi penyelundupan dipicu oleh perbedaan harga yang begitu tinggi di Indonesia dan PNG. Beberapa komoditas seperti kakao dan kopra sebagai bahan dasar produk coklat, misalnya, di Jayapura harganya jauh lebih murah jika dibanding dengan harga di PNG. Untuk narkoba jenis ganja yang ditanam di PNG, harganya akan sangat mahal saat tiba di Papua. Selinting kecil ganja bisa dihargai 100 ribu rupiah. Kontras harga berlaku juga pada barang-barang tambang seperti emas dari PNG dan BBM dari Indonesia.

Untuk penyelundupan senjata api, hal tersebut dipicu oleh kerawanan keamanan yang terjadi di PNG. Di sana, *tribal war* dan konflik-konflik politik masih sering terjadi dan tak jarang hingga menelan korban jiwa. Pemerintah PNG bahkan sampai membentuk *Committee on Gun Control* untuk mengawasi persebaran senjata api ilegal di negaranya. Maraknya penyelundupan di perbatasan RI-PNG tersebut membuat kedua negara lebih memperketat pengawasan di pintu-pintu perbatasan. Namun seiring ketatnya pengawasan di perbatasan RI-PNG, aksi penyelundupan yang berlangsung masif itu pun mulai adaptif: para penyelundup dari kedua negara memilih jalan tikus yang biasa digunakan oleh masyarakat pelintas batas tradisional. Dan dari sekian banyak jalan tikus yang ada di perbatasan Papua, kebanyakan para penyelundup memilih jalan tikus yang ada di Boven Digoel dan Keerom.²⁶

Perbatasan RI-PNG yang sebagian besar berupa gunung, bukit, hutan dan rawa, membuat keberadaan jalan tikus cukup sulit dideteksi. Hanya penduduk adat setempat yang biasa melintas batas yang mengetahuinya. Namun menurut Ketua Dewan Adat Kabupaten Keerom, Herman Yoku, di Keerom ada empat pintu masuk menuju PNG: *Wutung, Waris, Senggi, dan Komratoro*. *Wutung merupakan pintu besar. Sedangkan tiga lainnya pintu kecil, jalan setapak,*

²⁶ Suzana Wanggai, Kepala Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri (BPPKLN) Provinsi Papua, dalam salah satu berita yang dilansir Antara.

atau yang biasa di sebut sebagai jalan tikus.²⁷ Di tiga pintu inilah aksi-aksi penyelundupan sering terjadi.

²⁷ Portal Berita Tanah Papua, <http://tabloidjubi.com/16/2015/09/10/tiga-daerah-perbatasan-ri-png-di-keerom-rawan-penyeludupan-narkoba/>, diakses pada 31 Mret 2017.